



## Peran Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan tengah dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Arja Kiannur<sup>1</sup>, Muhammad Saifullah<sup>2</sup>, Anggi Windiarty<sup>3</sup>, Tiya Silviya<sup>4</sup>,  
Novita Mayasari Angelia<sup>5</sup>

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Alamat: Komplek Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
Korespondensi penulis: [arza.kiannor08@gmail.com](mailto:arza.kiannor08@gmail.com)

**Abstract :** *The management of public aspirations is a strategic task of the Public Relations (PR) department at the DPRD Secretariat to support information transparency and public participation. This study aims to examine the roles, challenges, and strategies of PR in managing public aspirations in Central Kalimantan Province. Using empirical and normative juridical approaches, primary and secondary data were qualitatively analyzed to evaluate the effectiveness of communication mechanisms implemented. The findings indicate that PR serves as a mediator between the public and the DPRD through hearings, discussion forums, and digital platforms. In addition to gathering public aspirations, PR also educates the public on mechanisms for submitting opinions and the importance of public participation. However, this study identifies several challenges, such as limited access to information for remote communities, insufficient public understanding of aspiration submission procedures, and slow responses to incoming inputs. To address these issues, innovations are required, including the implementation of an online-based management information system, capacity building through training, and periodic evaluations of aspiration management processes. These strategies are expected to enhance transparency, accountability, and the effectiveness of aspiration management, ensuring that public aspirations are optimally accommodated in legislative processes and regional development planning.*

**Keywords:** *Public Relations, DPRD, public aspirations, public communication, participation.*

**Abstrak :** Pengelolaan aspirasi masyarakat merupakan tugas strategis Humas Sekretariat DPRD dalam mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, tantangan, serta strategi Humas dalam mengelola aspirasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif, data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme komunikasi yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas berperan sebagai mediator antara masyarakat dan DPRD melalui audiensi, forum diskusi, dan platform digital. Selain menyerap aspirasi masyarakat, Humas juga mendidik masyarakat tentang mekanisme penyampaian pendapat dan pentingnya partisipasi publik. Namun, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses informasi bagi masyarakat di daerah terpencil, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur aspirasi, dan lambatnya respons terhadap masukan yang masuk. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan inovasi berupa implementasi sistem informasi manajemen berbasis daring, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan aspirasi. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan aspirasi, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara optimal dalam proses legislasi dan pembangunan daerah.

**Kata kunci:** Humas, DPRD, aspirasi masyarakat, komunikasi publik, partisipasi

### 1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas utama Humas di Sekretariat DPRD. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, surat, dan forum diskusi, Humas berupaya untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan politik. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja Humas yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga

pemerintah, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. (Ralph Adolph, 2016).

Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam mengelola aspirasi masyarakat, yang merupakan salah satu fungsi utama dari lembaga legislatif. Melalui berbagai mekanisme komunikasi, Humas berupaya untuk menyerap, mendokumentasikan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada anggota dewan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. Meskipun peran Humas sangat vital, terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan akses informasi bagi masyarakat di daerah terpencil, kurangnya pemahaman mengenai prosedur penyampaian aspirasi, serta lambatnya respons dari pihak Humas terhadap aspirasi yang masuk. (BERRA TERATAI LUBIS, 2019).

Dalam analisis ini, ditemukan bahwa Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mediator yang mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme pengajuan aspirasi. Humas Sekretariat DPRD melakukan kegiatan reses dan forum diskusi untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat, seperti yang tercatat dalam hasil reses anggota dewan yang mencakup 685 usulan dari masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian. (<https://haikalteng.id/berita/read/4026/sebanyak-685-aspirasi-masyarakat-berdasarkan-hasil-reses-anggota-dprd-barsel>).

Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengajuan aspirasi dan lambatnya respon dari pihak Humas dalam menanggapi aspirasi yang masuk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas Humas melalui pelatihan dan pengembangan sistem informasi yang lebih baik agar dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat. Kesimpulannya, peran Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sangat krusial dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik dalam proses legislasi dan perencanaan pembangunan daerah.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang digunakan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji aplikasi di lapangan, melihat Peran Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat. Data sekunder berupa bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Data diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, serta informasi dari para ahli dianalisis secara kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tugas dan Fungsi Humas Sekretariat DPRD**

Humas (Hubungan Masyarakat) Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peran vital dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga legislatif. Sebagai ujung tombak komunikasi antara DPRD dan masyarakat, humas bertanggung jawab menjalankan berbagai tugas dan fungsi yang mendukung keterbukaan informasi, pengelolaan aspirasi, dan pembentukan citra positif lembaga. Adapun tugas humas sekretariat DPRD adalah: ([https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/ppid\\_tugas/5](https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/ppid_tugas/5))

##### **1. Membantu Sekretaris DPRD**

Humas bertugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan, dan publikasi kegiatan DPRD.

##### **2. Fasilitasi Aspirasi**

Mengelola penerimaan pengaduan masyarakat dan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD.

##### **3. Pelayanan Publik**

Menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat mengenai kebijakan dan kegiatan DPRD.

##### **4. Pengaturan Kegiatan Protokoler**

Mengatur dan mengkoordinasikan layanan kegiatan protokoler untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

##### **5. Dokumentasi Kegiatan**

Menyusun dan mendistribusikan bahan rapat serta laporan hasil pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan Dewan Humas (Hubungan Masyarakat) Sekretariat DPRD memiliki fungsi strategis dalam mendukung komunikasi antara DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dengan masyarakat, media, dan pihak-pihak lain yang terkait. Berikut adalah fungsi utama humas Sekretariat DPRD:

##### **1. Perumusan Program Kerja**

Mengembangkan dan menyusun program kerja Humas sebagai pedoman kerja.

##### **2. Koordinasi Kebijakan**

Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program yang berkaitan dengan kehumasan.

3. Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan

Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung fungsi kehumasan, seperti publikasi produk hukum yang telah diundangkan. (<https://setdprd.rembangkab.go.id/tugas-dan-fungsi/>).

4. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Humas.

5. Penyampaian Informasi

Memberikan informasi kepada media tentang kebijakan dan tindakan yang diambil oleh DPRD, serta memfasilitasi peliputan media untuk acara resmi.

6. Membangun Hubungan dengan Publik

Humas berfungsi untuk membangun hubungan yang baik antara DPRD dengan masyarakat melalui komunikasi yang efektif.

7. Menangani Isu Publik

Mengatasi isu-isu yang muncul di masyarakat, termasuk berita hoax, dengan cepat dan akurat.

8. Pendidikan Masyarakat

Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah dan langkah-langkah yang diambil oleh DPRD.

**B. Fasilitasi Pengumpulan Aspirasi**

Fasilitasi pengumpulan aspirasi adalah proses yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi untuk mendengarkan, menerima, dan mengelola masukan, harapan, serta keluhan dari masyarakat. Dalam konteks Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, antara lain: (*Sitti Fatimah and Hafied Cangara, 2016*),

1. Audiensi

Pertemuan langsung antara masyarakat dan anggota DPRD, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Audiensi ini sering kali diadakan dalam bentuk forum terbuka atau pertemuan khusus.

2. Forum Diskusi

Kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu-isu tertentu yang relevan dengan kebijakan publik. Forum ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi pandangan.

### 3. Platform Digital

Penggunaan media sosial dan website resmi DPRD sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat dapat mengirimkan masukan melalui email, formulir online, atau media sosial seperti Facebook dan Twitter, yang memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan luas.

Adapun Proses penerimaan dan pengolahan aspirasi masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Penerimaan Aspirasi: Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai saluran akan diterima oleh Humas. Setiap masukan dicatat dan dikategorikan berdasarkan jenisnya, seperti keluhan, saran, atau informasi.
2. Pengolahan Data: Setelah diterima, aspirasi akan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Humas melakukan analisis terhadap masukan tersebut untuk menentukan tindak lanjut yang tepat. Data ini juga digunakan untuk menyusun laporan kepada pimpinan DPRD mengenai isu-isu yang diangkat oleh masyarakat. (*Bawa Supratman and others, 2019*),
3. Tindak Lanjut: Humas berkoordinasi dengan anggota DPRD dan instansi terkait untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah diterima. Tindak lanjut ini dapat berupa penyampaian langsung kepada pihak-pihak yang berwenang atau pengaturan audiensi lebih lanjut untuk membahas isu tertentu. (*Ibid*).

#### **C. Pendidikan dan Penyuluhan kepada Masyarakat**

Sosialisasi mekanisme penyampaian aspirasi merupakan langkah penting yang dilakukan oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan masyarakat memahami cara menyampaikan pendapat, saran, dan keluhan mereka. Beberapa metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi:

1. Pertemuan Warga: Mengadakan pertemuan dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan untuk menjelaskan mekanisme penyampaian aspirasi. Dalam forum ini, masyarakat diajak berdialog langsung, sehingga mereka dapat bertanya dan mendapatkan penjelasan yang jelas.
2. Penyebaran Materi Edukasi: Menggunakan brosur, pamflet, atau materi visual lainnya yang menjelaskan cara-cara penyampaian aspirasi, termasuk penggunaan platform digital seperti LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dan media sosial. Ini membantu menjangkau masyarakat yang mungkin tidak dapat hadir dalam pertemuan langsung. (*Putu Aditya Ferdian Ariawantara, Sulikah Asmorowati, and Erna Setijaningrum, 2020*),

3. Pelatihan dan Seminar: Mengadakan seminar atau workshop yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan perangkat desa, untuk membahas pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Metode ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. (Dennis R. Dean And Others, 1993),

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses pemerintahan adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang responsif. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi: (<https://cibeunying.desa.id/sosialisasi-dan-edukasi-meningkatkan-peran-perangkat-desa-dalam-partisipasi-masyarakat/>)

1. Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menyampaikan aspirasi. Kampanye ini juga menekankan pentingnya memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah.
2. Dialog Partisipatif: Mengadakan dialog terbuka di mana masyarakat dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai kebijakan publik. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga membangun rasa kepemilikan di kalangan masyarakat terhadap proses pemerintahan.
3. Evaluasi dan Umpan Balik: Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan. Dengan mendengarkan tanggapan masyarakat, Humas dapat memperbaiki metode sosialisasi di masa mendatang dan memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang paling efektif.

#### **D. Peran Utama Humas Sekretariat DPRD dalam Mengelola Aspirasi**

Humas (Hubungan Masyarakat) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memegang peranan penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan legislatif. Dalam menjalankan tugas ini, humas berperan sebagai penghubung yang memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dan diterjemahkan menjadi tindakan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Humas bertanggung jawab untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat melalui berbagai saluran, seperti audiensi, forum diskusi, dan media sosial. Aspirasi ini kemudian dianalisis dan disampaikan kepada anggota dewan untuk ditindaklanjuti. (Ibid). Humas juga berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan kebijakan DPRD kepada publik. Ini mencakup penyebaran berita melalui media massa dan platform digital, serta penyediaan bahan bacaan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Humas menjalin hubungan baik dengan media untuk memastikan bahwa informasi mengenai kegiatan DPRD dapat diakses oleh masyarakat luas. Kerja sama ini penting

untuk membangun citra positif lembaga dan meningkatkan transparansi. (Mujiati), Humas juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi dan tugas DPRD, serta pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Dengan pendekatan yang persuasif, Humas berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. (RESTRRAINT JUST SKB BAENE, 2022),

#### **E. Strategi dan inovasi dalam pengelolaan aspirasi**

Pengelolaan aspirasi masyarakat memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga legislatif. Sinergitas ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dapat diolah secara efektif dan ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini mencakup penguatan komunikasi antar unit dalam Sekretariat DPRD dan dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan transparansi. (Diyah Tri Irawati, 2019),

Implementasi sistem informasi berbasis daring dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengolahan aspirasi masyarakat. Dengan memanfaatkan platform digital, proses penyerapan aspirasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, serta memungkinkan masyarakat untuk memantau hasil dari usulan mereka. (Noval Rahman, 2024),

Mengadakan forum-forum partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau dialog publik untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat secara langsung. Forum ini tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga untuk memberikan edukasi mengenai proses pengambilan keputusan di DPRD. (Shofinatul Ainiyah, 2022),

Setelah mengumpulkan aspirasi, penting bagi Humas untuk menyusun program-program prioritas berdasarkan hasil penyerapan tersebut. Program-program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan dalam anggaran daerah. Hal ini akan meningkatkan relevansi kebijakan yang diambil oleh DPRD. (Ibid).

Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mengelola data aspirasi masyarakat secara efisien. Sistem ini harus mampu menyimpan, mengolah, dan menyajikan data secara real-time sehingga memudahkan pengambilan keputusan oleh anggota DPRD. (Haerul Fatah and others, 2023),

Melakukan pelatihan bagi petugas Humas dan anggota DPRD mengenai teknik komunikasi yang efektif dan pengelolaan data aspirasi. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan aspirasi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Ibid). Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan aspirasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta mencari solusi

yang tepat. Evaluasi ini juga harus melibatkan umpan balik dari masyarakat mengenai kepuasan mereka terhadap respons DPRD terhadap aspirasi yang disampaikan. (*Ibid*).

Strategi dan inovasi dalam pengelolaan aspirasi masyarakat oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi publik dan efektivitas kebijakan. Melalui kolaborasi, penggunaan teknologi informasi, forum partisipatif, serta evaluasi berkala, pengelolaan aspirasi dapat dilakukan dengan lebih optimal, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

#### 4. KESIMPULAN

Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mengelola aspirasi masyarakat untuk memastikan suara publik terakomodasi dalam proses legislasi dan pembangunan daerah. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti audiensi, forum diskusi, dan platform digital, Humas tidak hanya mengumpulkan aspirasi tetapi juga berperan sebagai mediator dan edukator. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peran Humas sangat vital, tantangan seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman prosedur, dan lambatnya respons terhadap aspirasi masyarakat masih menjadi kendala utama. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi dan strategi yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aspirasi.

#### DAFTAR REFERENSI

- Adolph, Ralph, 'IMPLEMENTASI CYBER PUBLIC RELATIONS DPRD DIY MELALUI WEBSITE SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA TAHUN 2017-2018', 2016, pp. 1-23
- Ariawantara, Putu Aditya Ferdian, Sulikah Asmorowati, and Erna Setijanigrum, 'Sosialisasi Sistem Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Pada Masyarakat Desa Semanding, Kabupaten Tuban', *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 4.1 (2020), p. 141, doi:10.20473/jlm.v4i1.2020.141-151
- BERRA TERATAI LUBIS, 'PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG DALAM MENJALANKAN Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Sarja Strata 1 (S1)', 2019
- Dean, Dennis R., C. Scawthorn, T. D. O'Rourke, F. T. Blackburn, David J. Whitney, Michael K. Lindell, and others, 'EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN EMPAT LAWANG SUMATERA SELATAN', *Explorations in Economic History*, 24.6 (1993), p. ETG 5-1-ETG 5-17, doi:10.1080/00033799300200371

- Diyah Tri Irawati, 'Diyah Tri Irawati Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara – STIA LAN Jakarta', 1.1 (2019), pp. 1–22
- Fatah, Haerul, Marlina Rahmawati Nurhanifah, Herlan Sutisna, Tri Wahyuni, Erni Ermawati, Nurul Ichsan, and others, 'Sistem Informasi Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Sebagai Pokok Pikiran Dprd Kota Tasikmalaya', 5.1 (2023), pp. 80–91
- Fatimah, Sitti, and Hafied Cangara, 'The Use of Communication Channels in Obsorption The Community Aspirations by The Information and Government of Pinrang Regency', 5.1 (2016), pp. 1–13
- Mujiati, 'Peran Humas Sekretariat DPRD Dalam Menjalin Hubungan Sinergis Antara Media Dengan DPRD Kabupaten Bulungan Mujiati 1 Aji Ratna Kusuma, 2 Enos Paselle 3', pp. 1–11
- Noval Rahman, 'Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik . Di Dalam', 3, 2024, pp. 1–17
- RESTRAINT JUST SKB BAENE, 'SIKRIPSI OLEH : RESTRAINT JUST SKB BAENE FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN', 2022, pp. 1–66
- Shofinatul Ainiyah, 'Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah Vol 7 No 1', 7.1 (2022), pp. 69–76
- Supratman, Bawa, Fatah Nashir, A S Rahman, Zainul Arifin, Cipto Sembodo, Badan Permusyawaratan, and others, 'Pelaksanaan Jaring Aspirasi Sebagai Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo', 4.1 (2019), pp. 1–16